

DAFTAR PUSTAKA

Buku

SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANDEGLANG. (2023). *BUKU SAKU METODE PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA*.

Abdurssamad, Z. (2021). *Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif*.

Jurnal

Altarazhi Bramantio Widhi, K. (2023). Efektivitas Layanan *E-Catalogue* Oleh Direktorat Pasar Digital Pengadaan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP). *Of Politic and Government Studies*, 13(1), 31–43.

Amelia Iftitah Damayanti, Tjahjanulin Domai, Abdul Wachid. “*Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang*”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol 1, No.2, Universitas Brawijaya, 2013, Malang.

Arham, A. R., Syamsurizal, S. E., Sofa, N., Pd, S. I., & Pd, M. (2023). Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (*E-Procurement*) pada PT XYZ. *Administrasi Bisnis & MICE XXI*, 12(1), 212–220.

Ariesta, D. (2021). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui *E-Catalogue* di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 156–172.

Bina Taruna Gorontalo, U., Meilinda Nainggolan, E., & Mardiana, S. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PROGRAM BELA PENGADAAN. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(1), 1–16.

Darmawan, S. A. (2022). Penetapan HPS E-Purchasing: Tinjauan Akuntabilitas dan Mekanisme Pasar. In *JPBJ* (Vol. 1, Issue 2).

Diani, F., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1970–1981.

Fadillah Sarah Salsa, J. E. A. (2022). Analisis Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Dinas Melalui E-Katalog di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanian

- Provinsi Sumatera Selatan. *Dinamika Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 18–24.
- Hamzah, K., & Ismail, I. (2021). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem E Purchasing Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng. *Public Administration*, 2(1), 429–438.
- Hardinata, D., & Kamaludin. (2022). HOW TO MINIMIZE RISK: THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC SECTOR SERVICES ELECTRONIC PROCUREMENT IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 27(3), 289–302.
- Iqbal, M. (2020). PENGARUH PELAKSANAAN E KATALOG DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP UMKM. *Jurnal USM Law Review*, 3.
- Kaimal Arifin, Daga, R., & Ashary Anshar, M. (2023). Analisis Penerapan E-Katalog terhadap Efektifitas dan Kepuasan Penyedia Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. In *Jurnal Sains Manajemen Nitro* (Vol. 2, Issue 2).
- Kristianto, A. (2022). Negosiasi Harga e-Purchasing Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 1(1), 53–60.
- Made Indry Widiyanti, N., & Ayu Putu Sri Widnyani, I. (2023). Implementation of Local *E-Catalog* Policy in Procurement of Goods and Services for MSMEs in Buleleng Regency. *Universitas Ngurah Rai Denpasar*, 1–8.
- Malinda, Y., & Hardjomuljadi, S. (2019). FAKTOR DOMINAN kend PENGGUNAAN E-CATALOGUE PADA PROSES PENGADAAN PROYEK KONSTRUKSI JALAN DENGAN METODA SPSS & RII. *Rekayasa Sipil*, 7(2), 90.
- Mawarni Mega, G. G. & D. M. (2020). PENERAPAN PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI APLIKASI *E-PURCHASING* DAN *E-KATALOG*. *Wacana Publik*, 14, 81–92.
- Nafi'ah, B. A. (2022). Analisis Stakeholder Kebijakan E-Katalog Lokal dalam Membranding Produk Lokal. *Public Sphere Review*, 15–21.
- Politeknik, A. A., & Nasional, P. (2024). *Implementasi E Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Pekanbaru*.
- Prikustiawan, A. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA MELALUI E-KATALOG LOKAL UNTUK PENGEMBANGAN UMKM KOTA SURABAYA. In *Priyanto SMIA* (Vol. 1, Issue 2).

- Putri Devanada Anisza, A. S. & Z. F. (2023). Akuntabilitas Pengadaan Barang atau Jasa E-Katalog di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya. *Universitas Dr. Soetomo Surabaya*, 1, 117–130.
- Rasyidin, R. A., & Pahlevi, T. (2021). Efektivitas Penerapan E-Performance di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kota Surabaya. *Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 9(1), 169–185.
- Rio Pinondang Hasibuan, “*Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru Tahun 2014*”. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2016, Pekanbaru
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif Enterpretif Interaktif dan Konstruktif, 154.
- Suprianto, A., Zauhar, S., & Santoso Haryono, B. (2019). Analisis Efektivitas Sistem *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *JIAP*, 5(2), 251–259.
- Suryani Wiwik. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-Procurement*) PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH PROVINSI RIAU. *IPDN*.
- Syarifuddin. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA *E-PROCUREMENT* PADA DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN TATA RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH. *Katalogis*, 3(11), 24–38.
- Wijayanti Ni Putu Laksmi. (2017). E-KATALAOG DALAM PENGADAAN BARANG. *Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 148–157.
- Wolker Sihaloho, S., Ariza, D., & Munandar, A. (2024). EFEKTIFITAS E-KATALOG PADA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) DALAM UPAYA PEMERINTAH MENCEGAH FRAUD. *Scientific Journal of Refelction*, 7(1), 219–230.
- Zaenal Arifin, “*Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*”, Jurnal Responsif Vol. 5 No. 5, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2017, Medan.

Undang-Undang

- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara online melalui E-Katalog

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 tentang E-Katalog

Website

Fianda Sjoftan Rassat. (2024, March 6). *KPK: 90 persen korupsi terkait pengadaan barang dan jasa*. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/3998061/kpk-90-persen-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa>

Febriyan. (2023). Berkaca dari kasus korupsi Wali Kota Bandung kpk masih ada celah meski sudah menggunakan e-katalog. Nasional.Tempo.Co. <https://www.tempo.co/hukum/berkaca-dari-kasus-korupsi-wali-kota-bandung-kpk-masih-ada-celah-meski-sudah-menggunakan-e-katalog--197314>

Hantoro, J. (2023). Jokowi Minta Sistem e-Katalog Diperbaiki Usai Kepala Basarnas Jadi Tersangka Korupsi. Nasional.Tempo.Co. <https://www.tempo.co/hukum/jokowi-minta-sistem-e-katalog-diperbaiki-usai-kepala-basarnas-jadi-tersangka-korupsi-162608>

Siti Juliantari. (2022, January 25). *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi>

Sulistyo, P. dwi. (2023). Barang E-katalog Dimanipulasi dalam Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Kaltim. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/25/barang-e-katalog-dimanipulasi-dalam-kasus-dugaan-korupsi-pengadaan-jalan-di-kaltim>